

**MOTIVASI INDONESIA MENGHENTIKAN EKSPOR MINERAL MENTAH JENIS
BAUKSIT KE TIONGKOK PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
MINERBA NO.4 TAHUN 2009**

Oleh:

Achmad Fauzi

(achmadfauzi.ojik@gmail.com)

Pembimbing : Drs. Syafri Harto, M.Si

Bibliografi : 7 Jurnal, 21 Buku, 3 Buletin Ilmiah, 28 Website.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-
63277

Abstract

This research would explain about Indonesia's government policy to stop and banned the export of raw material bauxite to Tiongkok after the enactment of the mineral and Coal Regulations Number 4/2009. This policy created a dynamic for trade relations between Indonesia and Tiongkok. Dynamics that change the orientation of bilateral relations of Indonesia-Tiongkok.

To see the problem of raw material bauxite policy by Indonesia's government, the author uses an explanotary qualitative research methodology, the data collection techniques by library reseach are derived from sources of literature books, published magazine, journals, and scientific articles. The persepective used is Merchantilism that see the state's role in regulating its economy. The theory used is Foreign Policy, Prebisch-Singer theory through a strategy of less developed countries in the world look at trade patterns and use the concept of national interest.

Indonesia's policy became implications for improved utilization and governance in natural resources of bauxite in order to achieve industrialization products (raw material bauxite) after enactment bauxite mining regulation Number 4/2009, while the implications of this policy for Tiongkok is reduced supply of bauxite from Indonesia, on the other side it is encouraging Tiongkok to Invest in the construction of smelter in Indonesia that prospects for the economy of both countries in the field of mineral and coal mines.

Key words: Mining and Coal Regulations 4/2009, raw material export regulations, industrialization of bauxite.

I. Pendahuluan

Penelitian ini adalah studi ekonomi politik internasional yang merupakan salah satu kajian dalam ilmu hubungan internasional. Secara garis besar politik internasional merupakan studi yang

mempelajari saling ketergantungan antara ekonomi internasional dan politik internasional, yang diakibatkan oleh

berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional.¹

Penelitian ini akan mencoba untuk menjelaskan motivasi Indonesia terhadap kebijakan penghentian ekspor mineral mentah bauksit ke Negara-negara di dunia terutama ke Tiongkok. Kebijakan tersebut adalah implementasi dari Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang didasarkan untuk peningkatan nilai tambah *raw material* mineral dan batubara (minerba), dalam penelitian ini yaitu membahas peningkatan nilai tambah bauksit.

Amanat dari Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 tentang kewajiban pengolahan dan pemurnian tambang dan mineral yang diberlakukan selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 sehingga pemberlakuan pengolahan dan pemurnian tambang dan mineral jatuh pada tanggal 12 Januari 2014.

Suatu negara yang ingin mengembangkan struktur ekonomi negaranya secara otomatis akan terjadi perubahan-perubahan seperti: luasnya tanah, kualitas tenaga kerja, kuantitas dan kualitas modal, tingkat teknologi, kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan realokasi dari sumber-sumber ekonomi, dan skala distribusi dan produksi.²

Kebijakan Indonesia menghentikan ekspor bauksit ke Tiongkok memberikan implikasi dan dampak bagi kedua negara. Indonesia mengalami penurunan intensitas perdagangan (dilihat dari neraca perdagangan) disebabkan ekspor dari sektor bauksit berkurang terutama setelah

berlakunya Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009, namun disisi yang lain kebijakan Indonesia ini diyakini akan mampu menciptakan nilai tambah dari *raw material* bauksit menjadi lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat nya dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Bauksit adalah bijih batuan yang terdiri atas kumpulan mineral yang kemudian dapat dimurnikan menjadi alumunium dan alumina (alumunium oksida). Bauksit adalah salah satu jenis mineral yang dimiliki Indonesia dalam jumlah cadangan yang cukup besar. Sumber daya alam berupa bauksit terdapat di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, sebagian di Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Pulau Sumba, dan Pulau Halmahera di Maluku.

Amanat undang-undang dasar 1945 yang tertuang pasal 33 undang-undang dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat undang-undang dasar ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Tambang dan mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*non renewable*) yang dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rencana dan keinginan dari Indonesia yaitu apabila pengelolaan tambang dan mineral (tambang bauksit salah satu contohnya) harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.³

¹ Perwita, AA., & Yani, Y.M. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 75.

² Charles P. Kindleberger. 1986. *Ekonomi Internasional*. Diterjemahkan oleh J. Bunardhi. Jakarta : Penerbit Aksara Baru, hlm. 64.

³ _____Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar

Kebijakan Indonesia dalam melakukan penghentian ekspor bauksit ke Tiongkok pasca pemberlakuan undang-undang minerba nomor 4 Tahun 2009, memiliki implikasi dan dampak bagi Indonesia dan Tiongkok. Pemerintah Indonesia menyadari akan sumber daya mineral jenis bauksit yang ada sekarang maupun jumlah cadangannya harus dikelola lebih baik lagi, yaitu dengan meningkatkan nilai tambah dari bijih dan logam bauksit, kewajiban bagi perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia untuk membuat *Smelter* di Indonesia.

Dampaknya bagi Tiongkok adalah terhentinya pasokan bauksit mentah dari Indonesia, menyebabkan pasokan bahan baku terhenti, Tiongkok beralih ke negara lain untuk mencari pemasok lain selain Indonesia dan mempengaruhi industri manufaktur bauksit di Tiongkok.

Sedangkan dampaknya bagi Indonesia adalah *Pertama*, lapangan pekerjaan di sektor pertambangan bauksit mengalami penurunan dengan adanya Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) dalam jumlah yang besar pada tahun 2014 dan 2015. *Kedua*, dampak dan implikasi dari penghentian ekspor bauksit ke Tiongkok berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Namun, jika melihat dampak sementara dari kebijakan Indonesia menghentikan ekspor bauksit ini sebenarnya pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan hasil pertambangan bauksit untuk meningkatkan nilai tambah dari *raw material* bauksit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Negeri. 2013. *Kajian Analisis Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Raw Material Tambang dan Mineral*. Jakarta., hlm. 1 - 2.

Kerangka Teori

Penulis menggunakan perspektif merkantilisme dalam melihat kebijakan Indonesia menghentikan ekspor mineral mentah jenis bauksit ke Tiongkok pasca pemberlakuan UU Minerba No.4 Tahun 2009. Merkantilisme berpandangan bahwa aktifitas ekonomi adalah harus mengikut pada tujuan utama pembangunan negara yang kuat⁴.

Ekonomi adalah alat politik, suatu dasar bagi kekuatan politik. Itulah pikiran pokok dari merkantilisme. Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan, daripada area kerja sama dan saling menguntungkan. Maksudnya adalah persaingan ekonomi antarnegara adalah '*zero-sum game*' dimana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain.⁵

Ringkasnya, merkantilisme menganggap perekonomian tunduk pada komunitas politik khususnya pemerintah. Aktifitas ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar atas peningkatan kekuatan Negara. Ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain seharusnya dihindari sejauh mungkin. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan mendapat prioritas. Ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain harus dihindari sejauh mungkin.

Teori Prebisch-Singer

Teori Prebisch-Singer (*Prebisch-Singer thesis*); mengambil nama dua pakar ekonomi pembangunan yang mengeksplorasi dampak-dampak negatif perdagangan internasional terhadap Negara-negara berkembang di Dekade 1950-an. Mereka berpendapat bahwa nilai tukar perdagangan

⁴ Jackson , Robert and Sorensen , Georg. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 283.

⁵ *Ibid*, hlm. 285-286.

negara-negara dunia ketiga akan terus menurun akibat rendahnya elastisitas permintaan komoditi primer terhadap perubahan pendapatan (pihak importir) dan harga.

Kebijakan Indonesia menghentikan ekspor mineral mentah jenis bauksit adalah berdasarkan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang telah memberikan indikasi bahwa perlunya upaya peningkatan nilai tambah dari aktifitas pertambangan di Indonesia. Jika ekspor mineral mentah terus saja dilaksanakan akan menyebabkan Indonesia hanya jalan ditempat dan belum berfikir untuk maju dalam mengelola sumberdaya mineral yang ada.

Konsep kepentingan nasional atau *national interest* adalah konsep yang populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional.⁶ Kepentingan nasional secara historis dikaitkan dengan geopolitik hubungan internasional⁷ dalam bidang ekonomi, energi, militer atau dalam bidang lainnya. Kepentingan nasional (*national interest*) adalah sebuah tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang ingin dicita-citakan suatu negara.

Teori Kebijakan Luar Negeri

Teori kebijakan luar negeri merupakan kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri menurut Henry Kissinger, berada pada interaksi antara aspek dalam negeri (domestik atau **internal**) suatu negara dan aspek internasional (**eksternal**) dari kehidupan suatu negara. James N. Rosenau menambahkan, di dalamnya termasuk

aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi dan aktifitas rutin untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara.⁸

II. Isi

Kebijakan Indonesia berdasarkan amanat UUD 1945

Indonesia adalah sebuah negara berdaulat, negara yang diatur oleh organisasi resmi untuk menjalankan pemerintahan yakni pemerintah. Atas dasar itulah kemudian Indonesia melalui pemerintah berusaha untuk menjalankan dan mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Karena pada prinsipnya UUD 1945 adalah landasan konstitusional negara Indonesia, maka oleh sebab itu landasan dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan amanat konstitusional tersebut. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU Minerba No. 4 Tahun 2009

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 33 ayat 3 tersebut telah diupayakan oleh pemerintah untuk kemudian dijabarkan melalui penerbitan undang-undang no. 4 tahun 2009 yang mengatur tentang pengolahan dan tata cara manajemen pengolahan mineral dan batubara (Minerba) dimana aspek *Pertama* adalah perusahaan yang melakukan usaha pertambangan mineral di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwajibkan memiliki legalitas yang berbadan hukum yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP)/IUPK, izin pertambangan mutlak harus dimiliki setiap perusahaan pertambangan.

Selain memperhatikan aspek legalitas perusahaan yang beroperasi di Indonesia,

⁶ Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S. hlm. 139.

⁷ Marc Coicaud, Jean. And Wheeler, Nicholas.J. 2008. *National Interest and International Solidarity*. New York: United Nations University Press, hlm. 2.

⁸ Perwita, A. A., & Yani, Y.M. *Op.Cit.* hlm. 47-49.

pemerintah Indonesia juga dengan tegas memberikan arahan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara (minerba). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dalam pasal 112C berbunyi pemegang kontrak karya (perusahaan tambang) yang telah memegang izin usaha pertambangan wajib melakukan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri.

Selain itu, juga telah terbitnya peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 (Permen ESDM), dimana Indonesia melalui pemerintah berupaya untuk melaksanakan strategi pembangunan jangka panjang terrefleksi dalam bunyi pasal 5 yaitu para pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dalam pasal 12 juga disebutkan bahwa pemegang kontrak karya tidak dibenarkan melakuakn ekspor bauksit ke negara lain, karena terdapat rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah mineral mentah bauksit tersebut. Pemerintah memberikan arahan kepada perusahaan tambang untuk menarik investor guna membangun *Smelter* di Indonesia supaya terciptanya Hilirisasi di sektor minerba terutama bauksit.

Aspek Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok

Peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok mencapai tingkat yang lebih serius pasca orde baru. Seiring proses perubahan arah kebijakan, Indonesia melihat Tiongkok sebagai sebuah harapan. Masa Presiden Habibie merupakan sebuah transisi proses demokratisasi dan kebijakan luar negeri Indonesia, namun masa pemerintahannya sebagian besar masih

berfokus pada peningkatan citra Indonesia di dunia internasional.

Di masa pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) adalah suatu keadaan dimana Tiongkok mendapatkan posisi istimewa dalam politik luar negeri Indonesia (Polugri RI). Selanjutnya, peningkatan hubungan hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok dapat dikatakan berkembang pesat.⁹ Kemudian dilanjutkan masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok terus berkembang dalam berbagai bidang terutama ekonomi dan politik.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) untuk pembentukan forum energi kedua Negara tepatnya pada tanggal 24 Maret 2002. Melalui kerjasama *memorandum of understanding* (MoU) tersebut menjadi langkah awal bagi Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia dalam bidang energi.

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hubungan Indonesia-Tiongkok semakin mengarah kepada keakraban dan keeratan hubungan antar kedua Negara. Masa pemerintahan SBY hubungan Indonesia-Tiongkok mencapai puncaknya ditandai dengan terlaksananya Deklarasi Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership*) pada tanggal 25 April 2005 di Jakarta.

Dinamika Hubungan Ekonomi Indonesia-Tiongkok

Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia adalah negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Secara demografis Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas

⁹ Christian Sinaga, Lidya. 2010. “*Memaknai Tahun Persahabatan Indonesia-China*”, Diakses melalui www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/324-memaknai-tahun-persahabatan-indonesia-cina- Diakses 23 November 2016.

dan diisi oleh penduduk yang banyak pula. Jumlah penduduk dan sumber daya alam yang besar menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 6.4 persen. Indonesia tercatat menempati posisi kedua dengan angka pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia setelah Tiongkok.

Sementara itu, Tiongkok merupakan negara raksasa ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Secara demografis, Tiongkok memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki pertumbuhan serta jumlah penduduk terbesar di dunia. Perubahan sistem ekonomi Tiongkok dari sistem tertutup dahulu menjadi sistem yang terbuka disebut oleh berbagai pengamat ekonomi adalah langkah awal Tiongkok berubah menjadi raksasa ekonomi dunia saat ini. Tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok sekitar 10 persen selama dekade terakhir.

Ekonomi Tiongkok yang terus berkembang pesat, hal tersebut menjadikan Indonesia terus melakukan hubungan dagang dengan Tiongkok guna memperoleh keuntungan bersama dalam aktifitas bisnis dan perdagangan internasional. Sebagai negara berkembang dan diakui oleh pengamat sebagai negara berkembang yang memiliki pertumbuhan yang sangat pesat, Indonesia terus menjalin hubungan dagang dengan negara lain termasuk Tiongkok.

Tabel 2.1 Negara Tujuan Eskpor Utama Indonesia (2006-2010)

Rank.	Country	2006	2007	2008	2009	2010	(%)
1.	Japan	12.1	13.0	13.7	11.9	16.4	5.28
2.	China	5.4	6.6	7.7	8.9	14.0	24.41
3.	United States	10.6	11.3	12.5	10.4	13.3	3.72
4.	India	3.3	4.8	7.0	7.3	9.8	29.44
5.	Singapore	7.8	8.9	10.1	7.9	9.5	2.80

Sumber: Ministry of Trade of the Republic Indonesia (n.d.b)

Tabel 2.2 Negara Tujuan Impor Utama Indonesia (2006-2010)

3.	Singapore	3.7	3.9	11.0	9.2	10.0	32.86
4.	United States	3.9	4.7	7.7	7.0	9.2	23.43
5.	Thailand	2.9	4.1	6.2	4.5	7.4	21.20

Sumber: Ministry of Trade of the Republic Indonesia (n.d.b)

Berdasarkan tabel di atas yaitu negara tujuan ekspor-impor Indonesia, terlihat bahwa Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara lain. Dalam tabel yang disajikan di atas, sektor perdagangan salah satunya didominasi oleh Tiongkok terutama dalam kegiatan impor. Dalam kegiatan ekspor, Tiongkok menempati urutan kedua sebagai negara tujuan ekspor Indonesia setelah India, dengan presentase sebesar 24.41 persen.

Sementara dalam kegiatan impor, Tiongkok menempati urutan pertama sebagai negara tujuan impor Indonesia dengan persentase 36.04 persen. Data di atas menunjukkan adanya kerjasama ekonomi yang cukup intens dilihat dari kegiatan ekspor impor Indonesia dengan negara lainnya. Indonesia sendiri merupakan mitra dagang Tiongkok terbesar keempat, yaitu sebesar 12.4 miliar dolar Amerika serikat setelah Malaysia (USD 22.2 Billion), Singapura (USD 17.9 Billion).

Kerjasama Energi, Mineral dan Batubara (Minerba) Indonesia – Tiongkok

Setidaknya ada beberapa kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Tiongkok dalam bidang energi dan sumber daya mineral, diantaranya adalah ¹⁰ *Pertama* adalah penunjukkan perusahaan Tiongkok yaitu Shanghai Know-How Marine Equipment sebagai distributor pelumas

¹⁰ Indonesia-China Jalin Kerjasama Energi dan Pertambangan. Tersedia di

<http://www.antaranews.com/berita/230123/indonesia-china-jalin-kerjasama-energi-dan-pertambangan>, diakses 11 Januari 2017.

marine Pertamina, dimana nantinya wilayah distribusi pelumas produk Pertamina itu adalah di Tiongkok dengan nilai penjualan sebesar 600 ribu dolar AS per tahun. Kedua pihak mematok target penjualan sebesar 1.500 dolar AS pada tahun kedua.

Kerjasama *Kedua* adalah pengolahan proyek Madura Strait PSC, yaitu proyek blok gas yang terletak di selat Madura. Kerjasama ini melibatkan tiga perusahaan, yaitu Samudera Energy, CNOOC Limited, dan Husky Oil. Kerjasama *Ketiga* adalah PT Aneka Tambang menggandeng Hangzhou Jinjiang Group Co. Ltd untuk melakukan proyek eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan bauksit. *Keempat* adalah Jinchuan Group berniat untuk berinvestasi membangun pabrik nikel di Sulawesi Tenggara, perusahaan Tiongkok akan menggandeng PT Barong Baragas Energy.

Kerjasama *kelima* adalah pembangunan pembangkit listrik dan eksploitasi nikel senilai 700 juta dolar AS antara PT Bumi Makmur Selaras dan Hanking Industrial Group. *Keenam* adalah kerjasama eksploitasi nikel yang dikerjakan oleh PT Indonesia Mitra Jaya dan Super Power International Holding Ltd. Kedua perusahaan sepakat untuk mengolah nikel di daerah pulau Seram.

Faktor-Faktor Penyebab Indonesia Menghentikan Ekspor Bauksit ke Tiongkok Pasca Pemberlakuan UU Minerba No. 4 Tahun 2009

1. Indonesia Menginginkan Hilirisasi di Sektor Minerba

Faktor-faktor penyebab Indonesia menginginkan hilirisasi di sektor mineral dan batubara, termasuk juga kepada hilirisasi sektor mineral mentah bauksit. Faktor-faktor penyebab Indonesia menginginkan hilirisasi adalah didasarkan atas dua faktor utama yaitu faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang kedua faktor tersebut membawa perubahan dan dinamika

perdagangan Indonesia-Tiongkok. Faktor internal adalah faktor yang berdasarkan pertimbangan yang berasal dari Indonesia dan faktor eksternal adalah faktor-faktor dari negara lain dalam hal ini Tiongkok.

Faktor-faktor internal akan dilihat dari aspek *Pertama*, Indonesia menginginkan hilirisasi sektor pertambangan mineral guna menciptakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari mineral mentah yang ada saat ini. *Kedua*, memperhatikan aspek dan keadaan lingkungan pasca tambang dan efeknya di masa yang akan datang jika tidak dikelola dengan baik. *Ketiga* melihat peluang untuk melakukan kegiatan hilirisasi tambang mineral bauksit dengan proses pemurnian dan pencucian di dalam negeri melalui *smelter*. *Keempat*, tentu saja adalah yang paling pokok berdasarkan amanat Undang-Undang Minerba No 4 Tahun 2009.

Sedangkan faktor eksternal lebih melihat kepada Tiongkok yang terbiasa mendapatkan bahan baku bauksit dan jenis mineral mentah lainnya yang ada di Indonesia, disadari secara jelas oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai salah satu kerugian bagi Indonesia di masa yang akan datang. Karena pada prinsipnya Tiongkok dinilai sukses menciptakan industrialisasi berbasis teknologi yang mengolah bauksit menjadi aluminium yang bahan bakunya diperoleh salah satunya dari Indonesia.

Tiongkok adalah importir utama yang selalu mengimpor bijih bauksit dengan jumlah terbesar dibandingkan dengan importir dari negara lain.¹¹ Bahan tambang dan mineral bagi Indonesia merupakan kekayaan yang harus mulai dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fakta menunjukkan bahwa beberapa komoditi tambang di ekspor tanpa pengolahan maksimal dan tanpa ada peningkatan nilai tambah secara maksimal. Beberapa produk tambang di ekspor dalam

¹¹ *Ibid*, Hlm. 3.

bentuk mentah (*raw material*) seperti nikel, bauksit dan lain-lain.¹²

Secara hitung-hitungan ekonomi, dari hasil kajian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia bahwa peningkatan nilai tambah dari bijih bauksit, nikel, dan tembaga ada potensi peningkatan nilai tambah sebesar US\$ 268.100.725.360. Bersamaan dengan peningkatan nilai tambah tentunya ada penerimaan negara dari pajak penghasilan (perusahaan bauksit di Indonesia), retribusi daerah bila proses produksi bijih dan konsentrat yang di ekspor dilakukan di dalam negeri tentunya.¹³

Penyerapan tenaga kerja yang lebih besar jika hilirisasi dilaksanakan Indonesia

Selain itu terdapat keuntungan dari penyerapan tenaga kerja yang menurut kajian Kementerian ESDM adalah mampu menyerap sebanyak 2.402.600 pekerja. Penyerapan tenaga kerja ini belum termasuk tenaga kerja industri hilir dan *multiplier effect* yang di dapat dari pengolahan hasil produk industri hulu mineral logam di Indonesia.

Semangat untuk mengupayakan Hilirisasi oleh Pemerintah Indonesia

Setidaknya ada dua hal yang akan membuat Indonesia berkembang menjadi negara maju. Pertama adalah Indonesia adalah negara yang dikaruniai kekayaan mineral terlengkap di dunia, Indonesia memiliki hampir sebagian mineral penting.¹⁴ Kedua adalah Indonesia memiliki sumber energi yang relatif besar dan beragam jenisnya seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan sumber-sumber energi terbarukan lainnya.

Saat ini Indonesia berupaya untuk mengembangkan suatu pola hilirisasi yang dijalankan di dalam negeri. Karena selama ini

¹² *Ibid*, Hlm 2.

¹³ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁴ *Analisis Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Raw Material. Op.Cit.*, hlm. 10.

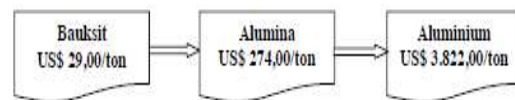
Indonesia hanya berfokus pada hasil tambang mineral yang dieksploitasi di perut bumi Indonesia masih diekspor dalam bentuk mentah (*raw material*). Ketika Indonesia akan mengambangkan sedikit demi sedikit setahap demi setahap industri tambang khususnya tambang Bauksit, maka Indonesia akan menjadi sentral percaturan harga komoditas bauksit di pasaran global.¹⁵

Potensi peningkatan nilai tambah bauksit

Peningkatan nilai tambah bauksit menjadi alumina dan aluminium dapat digambarkan :¹⁶

1. Pada tahun 2011, harga bauksit sebesar US\$ 29,00 per ton. Jika diolah menjadi alumina maka akan dapat dijual dengan harga US\$ 274,00 per ton (dengan adanya peningkatan sebesar 10,23 kali);
2. Alumina jika diolah menjadi aluminium maka nilai jualnya akan menjadi US\$ 3.822,00 per ton (terjadi peningkatan sebesar 139,23 kali dibanding dengan dijual dalam bentuk bauksit mentah).
3. Perhitungan sederhana peningkatan nilai tambah bauksit menjadi alumina dan aluminium berdasarkan harga masing-masing logam tersebut pada tahun 2011, dapat digambarkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1 Perbandingan harga bauksit, alumina, aluminium



¹⁵ *Ibid*

¹⁶ _____ *Kajian Kebijakan Pengembangan Industri Mineral Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus*. 2012. Jakarta: Pusat data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hlm 52.

Sumber : Kementerian ESDM RI tahun 2012.

Faktor Eksternal (dari Tiongkok) yang mempengaruhi kebijakan Indonesia

Faktor eksternal disini maksudnya adalah faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melihat fenomena yang terjadi, bahwa negara-negara maju dalam hal perdagangan, pemanfaatan teknologi untuk menciptakan industri berbasis pengolahan. Tiongkok adalah salah satu negara yang bisa dikatakan sukses dan pandai dalam menciptakan industri berbasis pengolahan bahan baku mineral mentah. Jumlah kebutuhan akan produk aluminium di dunia yang begitu besar jumlahnya, setidaknya coba diakomodasi oleh Tiongkok untuk menyuplainya.

Di kawasan Asia ada beberapa negara seperti Jepang, Tiongkok, Korea, dan Taiwan yang juga merupakan termasuk negara-negara pengimpor bahan-bahan mentah dari segala penjuru dunia. Untuk dapat melihat beberapa praktek pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara dilakukan oleh Tiongkok. *Pertama*, kita bisa melihat penerapan mekanisme ekonomi pasar khususnya untuk negara Tiongkok, yang sebenarnya juga memiliki cadangan dan sumber daya mineral khususnya bauksit.

Kelebihan Tiongkok adalah mereka memiliki posisi tawar yang cukup tinggi dari sisi teknologi, keahlian sumber daya manusia, modal dan infrastruktur. Dengan posisi tawar yang besar ini Tiongkok mampu untuk melakukan investasi dan eksploitasi bahkan intervensi di negara lain untuk kepentingan Tiongkok itu sendiri. Bahan mentah bisa didapatkan melalui impor dari negara lain, termasuk Indonesia untuk kemudian dikembangkan dan diolah di dalam negeri Tiongkok.¹⁷

¹⁷ Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara. 2011. *Kemana Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara Indonesia*. Warta Minerba, XI, hlm. 5-6.

Kedua, adalah kebijakan Tiongkok yang lebih konservatif dan protektif, yaitu Tiongkok dengan sumber daya yang cukup besar, Tiongkok kemudian menerapkan kebijakan protektif dalam arti seluruh potensi alam atau mineral dan batubara mereka digunakan sepenuhnya untuk kepentingan domestik. Disisi lain mereka masih bisa melakukan ekspansi dengan melakukan pencarian bahan mentah di segala penjuru dunia ini. Termasuk di Indonesia.

Maka Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009, bagi pemerintah Indonesia adalah sebagai upaya untuk meniru-niru dan mengikuti langkah bijak yang dijalankan Tiongkok dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara nya yang berorientasi hilirisasi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri nya sendiri. Setelah di dalam UU Minerba mengamanatkan tentang pentingnya optimalisasi manfaat produk pertambangan melalui kewajiban pengolahan pemurnia di dalam negeri bagi pelaku pertambangan.

Respon Tiongkok terhadap Kebijakan Mineral Indonesia

Kapal Aeriko milik Tiongkok sudah berada di laut Sulawesi pada 10 Januari 2014 silam. Aeriko merupakan 1 dari 10 kapal berjenis *bulk carrier* yang tidak diizinkan keluar perairan Indonesia oleh bea dan cukai, disebabkan oleh kapal Aeriko tersebut memuat ribuan ton mineral mentah.¹⁸ Karena pada tanggal 12 Januari 2014 pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 resmi berlaku.

Atas penahanan kapal tersebut, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Liu Jianchao mengirimkan surat kepada kementerian perhubungan, kementerian ESDM, dan kementerian perdagangan, dengan tembusan kepada pemerintah Sulawesi Tenggara. Duta besar Tiongkok untuk Indonesia tersebut merasa keberatan atas penahanan kapal-kapal pengangkut

¹⁸ *UU Minerba Mengejar Nilai Tambah*. 2014. Internal Magazine PT Vale Indonesia, hlm. 5-6.

mineral mentah yang siap dikirim ke Tiongkok. Karena hal ini akan merugikan Tiongkok dalam jumlah yang besar.

Pemerintah Indonesia merespon, bahwa beberapa bulan sebelum UU minerba disahkan, telah gencar melaksanakan sosialisasi dan mengingatkan perusahaan tambang yang berorientasi ekspor mineral mentah untuk menghentikan aktifitas ekspor tersebut. UU minerba Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan komoditas pertambangan diolah di dalam negeri sebelum diekspor.

Setelah tanggal 12 Januari 2014, dimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berlaku, maka Indonesia telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah dan juga menghentikan *Supply* nya ke Tiongkok. Implikasinya adalah Tiongkok mengalami kekurangan pasokan dari Indonesia. Pasokan besar dari Negara-negara di dunia sangat dibutuhkan oleh Tiongkok untuk menjamin keberlangsungan industrialisasi aluminium mereka yang berasal dari bahan baku bauksit.

Tiongkok dalam merespon kebijakan mineral Indonesia yang menghentikan pasokan bauksitnya, adalah dengan meningkatkan pasokan mineral mentah bauksit dari Australia. Tercatat pada desember tahun 2015 Australia memasok 120.000 ton bauksit ke Tiongkok.¹⁹ Tindakan Pemerintah Indonesia yang melarang dan menghentikan ekspor mineral mentah telah menyebabkan Tiongkok beralih untuk meningkatkan hubungan perdagangan, khususnya mineral mentah bauksit agar pasokan yang tidak didapatkan lagi dari Indonesia, digantikan oleh peran Australia dalam memasok mineral bauksit ke Tiongkok.

¹⁹ *Australia Gusur Malaysia sebagai pemasok utama bauksit.* Diakses melalui <http://www.tambang.co.id/australia-gusur-malaysia-sebagai-pemasok-utama-bauksit-ke-cina-11248/>. Diakses 19 Januari 2017.

Tiongkok kemudian juga menjalin peningkatan hubungan perdagangan dengan Malaysia untuk mendapatkan pasokan bauksit dari negara tersebut sebagai dampak dari kebijakan Undang-Undang minerba di Indonesia. Berdasarkan data Commodities Research Unit (CRU) bahwa Impor bauksit dari Malaysia secara signifikan meningkat diperkirakan bisa mencapai 10 juta ton, maka Malaysia pun menjadi negara penting bagi Tiongkok, setelah sebelumnya berharap dari Indonesia.

Indonesia hingga tahun 2013 telah menjadi pemasok utama bauksit untuk Tiongkok, sekitar 65 persen dari total pasokan.²⁰ Penghentian ekspor benar-benar telah membuat kesenjangan yang besar antara kebutuhan dengan pasokan yang ada di Tiongkok. Dengan permintaan alumina dari Tiongkok tumbuh tajam dengan sendirinya permintaan terhadap bauksit juga akan tinggi.

Respon Tiongkok dalam menilai kebijakan Indonesia dalam melarang dan menghentikan ekspor mineral mentah bauksit telah dibicarakan dalam pertemuan APEC di Beijing pada tahun 2014.²¹ Bagi Tiongkok kebijakan penerapan Undang-Undang Minerba di Indonesia itu menjadi topik yang hangat diperbincangkan, karena Tiongkok merasa terkejut Indonesia menerapkan kebijakan ini.

Implikasi dari penghentian dan pelarangan ekspor bauksit bagi Indonesia dan Tiongkok

1. Penurunan ekspor ditinjau dari neraca perdagangan Indonesia

Disebabkan mineral mentah adalah segmen yang cukup besar selama ini menunjang ekspor Indonesia (sekitar 3 persen

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Reaksi Dunia Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bahan Mentah.* Diakses melalui <http://www2.esdm.go.id/berita/43-mineral/6863-reaksi-dunia-terhadap-kebijakan-pemerintah-indonesia-menghentikan-ekspor-bahan-mentah-.html>. Diakses 19 Januari 2017.

dari total ekspor non migas).²² Maka dengan kebijakan penghentian akan berpengaruh terhadap nilai ekspor Indonesia. Estimasi penurunan sebesar 9,2 persen. Penurunan nilai ekspor dalam jumlah besar memberikan kerugian yang cukup signifikan terhadap pendapatan negara. Sub sektor mineral dan batubara saat ini berperan sebagai penopang utama pembangunan Indonesia terutama dalam hal sumber penerimaan negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi dan penyediaan lapangan kerja.

Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Indonesia (AP3BI) bahwa pundi-pundi pendapatan Indonesia dari ekspor bauksit ini adalah sebesar USD 1,6 Miliar hingga USD 2 Miliar per tahun.²³ Angka tersebut adalah asumsi dari jumlah volume yang sama pada tahun 2013 yaitu sebesar 40 Juta ton hingga 50 Juta ton yang senilai dengan USD 40 per ton.

Implikasi dari penghentian dan pelarangan ekspor mineral mentah bauksit ke Tiongkok secara jelas tampak dari data neraca perdagangan yang dikeluarkan oleh data BPS tersebut di atas. Terutama data pada tahun 2014 dan 2015 (dimana pemberlakuan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dilaksanakan di dalam negeri), neraca perdagangan tahun 2014 tercatat defisit sebesar (2.197.979.699), tahun 2015 juga terjadi defisit sebesar (7.671.487.280) atau terjadi peningkatan defisit dari tahun sebelumnya (2014) hampir empat kali lipat. Sedangkan di tahun 2016 tercatat defisit perdagangan Indonesia menyentuh angka (304.335.397.699).

²² *Larangan Ekspor Mineral Mentah*. Diakses melalui <http://www.idedunia.com/2015/09/larangan-ekspor-mineral-mentah.html>. Diakses 17 Januari 2017.

²³ Sumbang Devisa, Pengusaha Bauksit minta izin mengekspor lagi. Diakses melalui <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150929183849-85-81668/sumbang-devisa-pengusaha-bauksit-minta-izin-mengekspor-lagi/>. Diakses 17 Januari 2017.

Gelombang PHK sektor pekerja tambang mineral

Kebijakan pemerintah Indonesia yang menghentikan ekspor mineral dalam bentuk mentah berimplikasi terhadap sektor pekerja tambang. Pekerja tambang tidak lagi bisa bekerja karena perusahaan telah berhenti beraktifitas ditambah lagi dengan beban operasional yang tidak sanggup lagi ditanggung oleh perusahaan tambang. Keadaan tersebut telah menjadi sebab utama pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan pekerja.

Sejak pemberlakuan kebijakan larangan dan penghentian ekspor material mentah pada Januari 2014, telah menyebabkan gelombang PHK di setiap perusahaan tambang yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Aturan tersebut telah menyebabkan perubahan bagi perusahaan. Sementara bagi Pemerintah Indonesia, aturan tersebut telah diberikan beberapa tahun sebelumnya, sehingga seharusnya perusahaan sudah siap dalam menangani permasalahan ini.

Pembicaraan Indonesia-Tiongkok melalui Trade and Investment Forum on Energy, Mineral and Infrastructure 2014.

Delegasi kementerian ESDM menghadiri *Trade and Investment Forum on Energy, Mineral and Infrastructure* yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Forum ini telah dilaksanakan di Chongqing Tiongkok yang terselenggara atas kerjasama antara KBRI dengan Pemerintah Kota Chongqing RRT.²⁴

Forum ini yang berlangsung tanggal 28 Februari 2014 bertujuan untuk menyampaikan penjelasan kebijakan Indonesia tentang peluang investasi di bidang pengolahan dan pemurnian mineral, bidang energi, dan bidang infrastruktur kepada para pengusaha Tiongkok. Forum ini sejatinya

²⁴ Sujatmiko. 2014. *Mendulang Investasi dari Tiongkok*. Warta Minerba, XIX, hlm 20.

dihadiri oleh 150 peserta yang berasal dari pengusaha Tiongkok, pengusaha dari pengusaha Tiongkok, pengusaha Indonesia serta perwakilan delegasi kedua negara Indonesia dan Tiongkok.

Forum ini adalah klarifikasi Indonesia kepada Tiongkok terhadap kebijakan mineral Indonesia melalui UU No. 4 Tahun 2009. Indonesia juga dalam kesempatan ini mengundang para investor untuk melakukan investasi dalam bidang pengolahan dan pemurnian mineral mentah di Indonesia. Forum yang dilaksanakan di Tiongkok ini telah mendapat respon dari kalangan pengusaha Tiongkok dan delegasi dari Indonesia bahwa Indonesia dan Tiongkok sejak beberapa tahun belakangan telah mejalain hubungan perdagangan yang semakin intensif.

Forum ini juga dinilai oleh para kalangan pengusaha Tiongkok sebagai upaya menimbulkan rasa saling memahami terkait kebijakan Indonesia mengentikan ekspor mineral mentah bauksit nya ke negara-negara di dunia termasuk Tiongkok. Bagi kalangan pengusaha Tiongkok, peluang untuk berinvestasi *smelter* di Indonesia memiliki prospek bagus yang dilandaskan oleh kedekatan kedua negara dalam hal perdagangan dan investasi.

Investasi Tiongkok ke Indonesia pasca pemberlakuan UU Minerba No. 4 Tahun 2009

Kebijakan Indonesia dalam menghentikan ekspor bauksit ke Tiongkok telah telah berjalan dengan dinamika bagi Indonesia dan Tiongkok. Pasca pemberlakuan undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang minerba, yang mengamanatkan pelarangan dan penghentian ekspor bauksit ke negara-negara dunia, termasuk ke Tiongkok. Kebijakan ini telah dilihat bagi Tiongkok dari sisi lain nya, yaitu Tiongkok melihat nya sebagai peluang yang baik.

Bahwa dengan pembangunan pengolahan dan pemurnian bauksit yang

direncanakan Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari bauksit, adalah menjadi suatu peluang bagi perusahaan tambang asal Tiongkok untuk berinvestasi. Adapun perusahaan Tiongkok yang melakukan investasinya di Indonesia pasca pemberlakuan undang-undang no. 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :²⁵

1. Proyek *Smelter Grade Alumina* (SGA) Mempawah, lokasi proyek ini terletak di Kalimantan Barat. Perkiraan biaya proyek sebesar US\$ 1 Miliar dengan kapasitas produksi 1,2 juta metrik ton SGA per tahun. Proyek ini adalah kerjasama patungan antara perusahaan Tiongkok (Hangzhou Jinjiang Group) dengan kepemilikan sahan 49 Persen dengan perusahaan Indonesia (Aneka Tambang/Antam) dengan kepemilikan sahan 51 persen.
2. China Hongqiao Group Ltd membangun smelter bauksit di Kalimantan Barat senilai USD 1 miliar atau setara dengan 10 Triliun Rupiah. Perusahaan Tiongkok tersebut bekerjasama (*joint venture*) dengan perusahaan Indonesia yaitu PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA). Proyek pabrik pengolahan smelter ini akan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 2.000 orang. Smelter yang dibangun akan mengolah bauksit menjadi alumina, kemudian alumina akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kedua belah pihak sepakat untuk mendirikan, mengembangkan, mengoperasikan, dan menjual produk alumina (produk turunan bauksit).
3. Perjanjian kerjasama antara PT Yinyi Indonesia Mining Investment Group dengan PT Harum Sukses Mining dan PT Bumi Halteng Mining untuk

²⁵ *Kajian Kebijakan Pengembangan Industri Mineral Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus*. Op.,Cit, hlm 47.

pembangunan smelter senilai USD 900 Juta.

4. Perjanjian join venture untuk membangun smelter industri alumina di Kalimantan Barat senilai USD 1,4 miliar. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh PT Billy Indonesia dan PT Indonusa Dwitama dengan China Aluminium Corporation of China Ltd.
5. Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd, membangun smelter aluminium di Teluk Bintan, Kepulauan Riau senilai USD 5 miliar. Proyek ini bergerak di bidang pengolahan Bauksit atau smelter. Rencananya smelter tersebut memiliki kapasitas 2,1 juta ton per tahun. Bauksit ini akan diolah menjadi alumina lalu menjadi aluminium ingot dengan hasil produksi 3,500 ton per tahun. Dalam laman resmi perusahaan tersebut tercatat didirikan pada tahun 1993 dan telah menjadi perusahaan publik pada tahun 1999. Perusahaan ini memiliki anak usaha di bidang kelistrikan, alumina, aluminium.

III. Penutup

Bahan tambang Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun faktanya, pemanfaatannya saat ini belum optimal - beberapa komoditi tambang di ekspor tanpa pengolahan maksimal dan tanpa ada peningkatan nilai tambah maksimal. Pemanfaatan bahan tambang di Indonesia selama ini masih sedikit sentuhan teknologinya, beberapa produk tambang di ekspor dalam bentuk bijih, seperti nikel, bauksit dan konsentrat, seperti tembaga.

Bauksit Indonesia masih diekspor dalam bentuk barang mentah (*raw material*) ke beberapa negara. Di lain pihak Indonesia masih mengimpor alumina, produk lanjutan dari bauksit untuk memenuhi kebutuhan

industri pemakai dalam negeri. Akibat dari perdagangan luar negeri seperti ini, menyebabkan Indonesia kehilangan devisa negara, sekaligus barang tambang yang jumlahnya sangat besar akibat perbedaan harga antara bauksit dengan alumina yang sangat besar. Oleh sebab itu, ekspor hasil tambang dalam bentuk mentah harus mulai diminimalisasi agar ada nilai tambah yang bisa didapatkan dari hasil tambang dalam negeri.

Indonesia sebagai negara yang telah membuat suatu kebijakan yang melarang, serta menghentikan ekspor bauksit ke negara-negara di dunia termasuk ke Tiongkok telah mendorong pemerintah untuk aktif dalam pembicaraan-pembicaraan melalui mekanisme pengiriman delegasi dan utusan untuk menjelaskan kepada Tiongkok bahwa kebijakan penghentian ekspor bauksit bukan upaya Indonesia untuk merusak hubungan dengan Tiongkok. Akan tetapi lebih kepada melihat dan mengolah serta mengelola sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambah dari aktifitas pertambangan mineral bauksit. Bagi Tiongkok hal ini bisa dipahami dan dimengerti, dan sama sekali Tiongkok tidak ada keinginan untuk membawa masalah ini ke organisasi internasional seperti *world trade organization* (WTO).

Implikasi dari kebijakan Indonesia menghentikan ekspor bauksit adalah secara jangka pendek adalah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan berskala kecil dan menengah bangkrut (karena tidak punya cukup modal untuk membangun *smelter*), peningkatan investasi dari Tiongkok dalam pembangunan fasilitas *smelter* di Indonesia. Sedangkan implikasi dari kebijakan ini bagi Tiongkok adalah berkurangnya pasokan bauksit, sehingga Tiongkok sebagai salah satu negara produsen alumina dan aluminium (produk turunan bauksit) terbesar di dunia mencari

pemasok lain selain Indonesia, yaitu Australia, dan Malaysia.

Referensi

Perwita, AA., & Yani, Y.M. 2005.

Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung:

PT Remaja Rosdakarya, hlm 75.

Charles P. Kindleberger. 1986. *Ekonomi Internasional*. Diterjemahkan oleh J. Bunardhi. Jakarta : Penerbit Aksara Baru, hlm. 64.

Jackson, Robert and Sorensen, Georg. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 283.

Todaro, Michael P and Smith, Stephen C.. 2006.

Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan. Jakarta : Penerbit Erlangga, hlm. 92-93.

Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan*

Internasional : Disiplin dan Metodologi.

Jakarta: LP3S. hlm. 139.

Marc Coicaud, Jean. And Wheeler,

Nicholas.J. 2008.

National Interest and International Solidarity. New York: United Nations University Press, hlm. 2.

Hendrati, Ignatia Martha, dkk. 2014. "Menakar

Prospek Kelayakan Investasi Industri Peralatan Rumah Tangga Berbahan Baku Aluminium". JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen September 2014, Vol. 1 No.2, hlm 151-158.

Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara. 2011.

Kemana Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara Indonesia. Warta Minerba, XI, hlm. 5-6.

_____. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. 2013. *Kajian Analisis Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Raw Material Tambang dan Mineral*. Jakarta., hlm. 1 - 2.

_____. *Kajian Kebijakan Pengembangan Industri Mineral Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus*. 2012. Jakarta: Pusat data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sujatmiko. 2014. *Mendulang Investasi dari Tiongkok*. Warta Minerba, XIX, hlm 20.

UU Minerba Mengejar Nilai Tambah. 2014. Internal Magazine PT Vale Indonesia, hlm. 5-6.

"*Kerangka Hubungan Bilateral*" Diakses melalui

<http://www.portal-hi.net/kerangka-hubungan-bilateral/>.

"*Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok*

pada era pemerintahan SBY" dalam [http://www.academia.edu/6102587/Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China Tiongkok pada Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2013](http://www.academia.edu/6102587/Dinamika_Hubungan_Bilateral_Indonesia-China_Tiongkok_pada_Era_Pemerintahan_Presiden_Susilo_Bambang_Yudhoyono_2004-2013) .

Christian Sinaga, Lidya. 2010. "*Memaknai Tahun*

Persahabatan Indonesia-China",

Diakses

melalui

www.politik.lipi.go.id/index.php/in/k

olom/politik-internasional/324-
memaknai-tahun-persahabatan-
indonesia-cina-.

[81668/sumbang-devisa-pengusaha-
bauksit-minta-izin-mengekspor-lagi/](#).

Indonesia-China Jalin Kerjasama Energi dan

Pertambangan. Tersedia di
<http://www.antaraneews.com/berita/230123/indonesia-china-jalin-kerjasama-energi-dan-pertambangan>,

Pabrik Bauksit Investasi Tiongkok Serap
Ribuan

Tenaga Kerja. Diakses melalui
<http://www.kalamanthana.com/2016/04/29/pabrik-bauksit-investasi-tiongkok-serap-ribuan-tenaga-kerja/>.

*Australia Gusur Malaysia sebagai pemasok
utama bauksit.* Diakses melalui
<http://www.tambang.co.id/australia-gusur-malaysia-sebagai-pemasok-utama-bauksit-ke-cina-11248/>.

*Reaksi Dunia Terhadap Kebijakan
Pemerintah*

*Indonesia Menghentikan Ekspor
Bahan Mentah.* Diakses melalui
<http://www2.esdm.go.id/berita/43-mineral/6863-reaksi-dunia-terhadap-kebijakan-pemerintah-indonesia-menghentikan-ekspor-bahan-mentah.html>.

Larangan Ekspor Mineral Mentah. Diakses
melalui

<http://www.idedunia.com/2015/09/larangan-ekspor-mineral-mentah.html>.

Sumbang Devisa, Pengusaha Bauksit minta
izin

mengekspor lagi. Diakses melalui
<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150929183849-85->